



பெரிந்திபுரபிந்திபுர
PEMERINTAH PROVINSI BALI

பாணகிபிபுபு

BADAN PENGHUBUNG

பாணகிபிபுபு/புரபுபுபுபுபுபுபு (புரபுபு) புரபுபுபுபுபுபு

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

பாணகி (புரபுபுபுபுபுபுபுபுபுபுபுபுபு)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NOMOR B.35.500.12.18.1/515/TU/BANHUB

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel diperlukan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik perlu ditetapkan pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi yang bersifat terbuka maupun informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KEDUA Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
: sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU merupakan penambahan dan/atau pembaruan dari Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah ditetapkan sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENGHUBUNG,
Arifin Efendi, ST.,MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197107142000031003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, di Denpasar (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali, di Denpasar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, di Denpasar;



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
NOMOR B.28.500.12.18.1/515/TU/BANHUB
TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK TAHUN 2025

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
A.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala								
1.	Kedudukan/ Domisili Badan Penghubung Provinsi Bali	Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://g.co/kgs/a3yWcR1
2.	Struktur Organisasi Banhub Provinsi Bali	Memuat struktur organisasi Banhub Provinsi Bali	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/profil/struktur-organisasi/
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Banhub Provinsi Bali	Memuat informasi tentang tugas pokok, kewenangan dan fungsi Banhub Provinsi Bali	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/
4.	Tujuan Organisasi Banhub Provinsi Bali	Memuat informasi tentang Tujuan Organisasi Banhub Provinsi Bali	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/profil/visi-dan-misi/



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
5.	Gambaran Umum Banhub Provinsi Bali	Memuat informasi tentang sejarah singkat berdirinya Banhub dan nama pemimpin perperiode	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/
6.	Komposisi pegawai	Memuat informasi tentang komposisi dan jumlah pegawai	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/profil/kepegawaian/
7.	Profil pimpinan	Memuat informasi tentang profil pejabat/pimpinan	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/profil/struktur-organisasi/
8.	Agenda Kegiatan Badan	Memuat informasi Agenda kegiatan Badan	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/anjungan-daerah-bali-tmii/event-kegiatan-di-ajungan-daerah-bali-tmii/
9.	Laporan hasil Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
10.	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
11.	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025	Informasi Ringkasan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2025	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
12.	Laporan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024	Memuat ringkasan informasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya pada bulan atau Tahun 2024	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
13.	Laporan Keuangan Tahun 2024	Ringkasan laporan keuangan tahun anggaran 2024	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
14.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2024	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang wajib dipublikasikan dan telah diverifikasi KPK	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
B.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta								
1.	Prosedur peringatan dini bencana dan evakuasi bila terjadi kebakaran	Informasi tentang Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
2.	Prosedur peringatan dini dan evakuasi bila terjadi gempa bumi	Informasi tentang Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat gempa bumi	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
C.	Informasi yang Wajib Diumumkan Setiap Saat								
1.	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Memuat daftar informasi yang bisa diakses publik.	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/
2.	Laporan pelayanan akses Informasi Publik Tahun 2024	Laporan pelayanan informasi	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/
3.	Siaran Pers Tahun 2025	Informasi tentang Siaran Pers/Rilis kegiatan Badan yang dibiayai APBD dan APBN	Kepala Badan	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
4.	Surat Keputusan Kepala Badan Tahun 2024	Informasi tentang keputusan, dan/atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Banhub Provinsi Bali	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://perwakilan.baliprov.go.id/
5.	Ringkasan Daftar Perjanjian Kerja dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Ringkasan pekerjaan dan rekanan pengadaan barang/jasa di tahun 2024	Kepala Badan	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Sub Promosi dan Informasi	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
6.	SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
7.	SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
8.	SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
9.	SOP Pengendalian Dan Verifikasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
10.	SOP Pengendalian Dan Verifikasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
11.	SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
12.	SOP Penyusunan Renja Banhub	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
13.	SOP Penyusunan Renstra Banhub	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
14.	SOP Penyusunan RKA, DPA, dan Perjanjian Kinerja	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
15.	Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Administrasi	Informasi tentang Pengelolaan organisasi dan administrasi	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link
16.	Pedoman Pengelolaan Kepegawaian	Informasi tentang pengelolaan kepegawaian	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Soft Copy		
17.	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	Memuat ringkasan informasi terkait dokumen pelaksanaan anggaran	Kepala Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2025	✓	✓	Aktif	https://drive.google.com/drive/folders/1IZBL9L_vdOjsjzRM_2_-GXZLd64IZ5FQ?usp=drive_link


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA BADAN PENGHUBUNG,
Arifin Efendi, ST.,MT
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP.197107142000031003



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

